

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Untuk membuat kemajuan besar dalam ekonomi global modern, pembangunan suatu negara harus memprioritaskan kenaikan standar hidup komunal dan menurunkan kemiskinan. Meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat adalah bagian dari kenaikan kualitas hidup ini. Tindakan strategis diperlukan untuk mencapai hal ini seperti mempromosikan distribusi pendapatan yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif lintas generasi, suku, jenis kelamin, dan wilayah geografis. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan adalah satu dari sekian strategi untuk mendorong kemajuan ekonomi. Partisipasi perempuan yang lebih aktif bisa mempromosikan kesetaraan gender dalam pembangunan dan membantu dalam pengurangan kemiskinan (Dabla-Norris dkk., 2015). Tetapi, indikator penting lainnya untuk mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah dan hasil berbagai proyek pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi.

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus tumbuh dengan bagus dan ilmiah sambil menjunjung tinggi stabilitas dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa bisa dipakai untuk menggambarkan keadaan ekonomi di daerah khusus. Kenaikan nilai ekonomi bisa dipakai untuk menentukan apakah suatu negara sudah berhasil menumbuhkan ekonominya. Saat mengevaluasi kenaikan nilai ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah bisa dimanfaatkan sebagai tolak ukur pertumbuhan, terlepas dari apakah itu positif atau

negatif (Rahman dkk., 2016). Angka PDRB ini bisa memperlihatkan apakah ada kenaikan aktivitas ekonomi di daerah itu atau tidak.

Ekspansi ekonomi didukung oleh dua puluh tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Sebab berfungsi sebagai inti administrasi dan perekonomian provinsi, Bandung, ibu kota, sering menghasilkan pertumbuhan PDRB tertinggi. Satu dari sekian daerah yang mengalami ketimpangan adalah Jawa Barat. Provinsi ini memuat sembilan kota dan delapan belas kabupaten, masing-masing dengan karakteristik regional yang unik. Posisi geografis Jawa Barat dan potensi sumber daya yang beragam menghasilkan pola pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ketimpangan berasal dari kemampuan untuk tumbuh di wilayah yang berbeda. Bagian utara dan selatan Jawa Barat tidak sama. Wilayah selatan lebih tertinggal, di lain sisi wilayah utara bergantung pada pertanian dan industri (bps.go.id, 2023).

Sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi. Industri pengolahan merupakan sektor utama yang mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat karena keberadaan kawasan industri besar seperti di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta yang menjadi pusat manufaktur nasional.

Konsepsi dasar tentang gender berfokus pada disparitas sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, (Syifa Salsabila dkk., 2024), memaparkan bahwa seks merupakan pembedaan antara laki-laki dan perempuan menurut anatomi dasar. Istilah "gender" sudah sering dipakai dalam tulisan dan percakapan. Bahkan jika istilah ini biasanya tidak dipakai dengan tepat, kadang-kadang bisa mengakibatkan kesalahpahaman tentang jenis kelamin. Alih-alih

merujuk pada jenis kelamin tertentu, interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan menjadi rujukan dari gender.

Pencanangan *Millenium Development Goals* (MDGs) dilakukan saat tahun 2017. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada tahun 2000, PBB bertekad untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada tahun 2015. Di antara delapan *Millenium Development Goals* (MDGs) adalah pengurangan kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan untuk mencapai tujuan ini. Setelah selesainya Tujuan Pembangunan Milenium pada bulan September 2015, *Sustainable Development Goals* (SDGs) ditetapkan menjadi rencana pembangunan berkelanjutan. Di antara 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs), kesetaraan gender (SDG 5) telah ditambahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (Sudirman & Susilawaty, 2022). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketimpangan gender adalah masalah yang tersebar luas di semua negara.

Kesempatan yang sama untuk menggunakan hak asasi manusia akan dimiliki oleh perempuan dan laki-laki saat perlakuan yang sama diterima oleh mereka sehingga mereka bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan politik, sosial, budaya, dan ekonomi negara mereka. Selain sekadar memberikan pengetahuan dan keterampilan ekonomi, pendidikan ekonomi bagi perempuan juga membuka jalan bagi ketimpangan gender dalam pertumbuhan ekonomi (Rahim, 2024).

Pemilihan kandidat sering dibatasi oleh kesenjangan gender, yang secara signifikan mengganggu kemampuan mereka untuk makmur atau menuai hasilnya. Kualitas hidup masyarakat bisa ditingkatkan dengan adanya pembangunan yang bertanggung jawab atas bobot kehidupan manusia. Ketimpangan gender juga menghambat kemajuan ekonomi, produksi, dan efisiensi. Lewat pengucilan

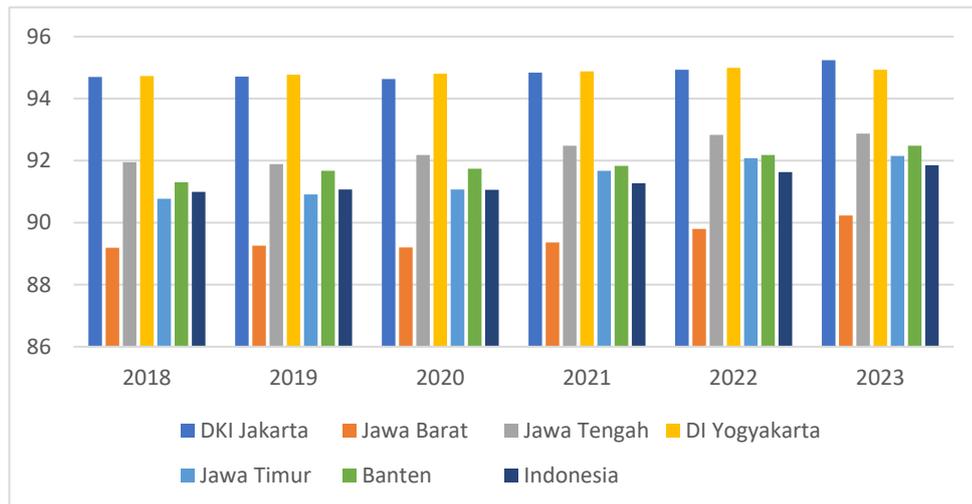
sistematis laki-laki dan perempuan dari sumber daya, layanan publik, dan aktivitas produktif, serta dengan membatasi penjumlahan SDM di dalam negeri dan di pasar tenaga kerja, diskriminasi gender menghambat pertumbuhan ekonomi dan kenaikan standar hidup (World Bank, 2005).

Ketimpangan gender di Indonesia memiliki karakteristik berbeda dibandingkan negara lain, terlihat dari partisipasi tenaga kerja perempuan yang lebih rendah, kesenjangan upah, dan keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan yang terbatas. Namun, Indonesia sudah menunjukkan kemajuan, seperti peningkatan partisipasi pendidikan perempuan dan program pemberdayaan melalui kebijakan pemerintah. Negara maju seperti Swedia dan Norwegia memiliki kesetaraan gender tinggi berkat kebijakan yang mendukung perempuan. Negara berkembang di Afrika dan Asia Selatan menghadapi tantangan lebih besar seperti rendahnya angka melek huruf perempuan, pernikahan dini, dan keterbatasan akses ke pekerjaan formal.

Satu dari sekian indeks pertumbuhan terkait gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender keduanya menilai pencapaian di bidang yang sama, tetapi Indeks Pembangunan Gender menyoroti kesenjangan prestasi antara laki-laki dan perempuan. Taraf kemakmuran suatu bangsa dalam hal kesejahteraan manusia dan kualitas hidup bisa diukur dengan memanfaatkan dua indikator yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Pamungkas & Hukom, 2024). Negara dengan nilai IPG yang tinggi umumnya memiliki sistem ekonomi yang lebih efisien, inovatif, dan adil. Oleh karena itu, IPG tidak hanya mencerminkan kesetaraan gender, tetapi juga menjadi

tolok ukur penting dalam menilai kualitas pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah.

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Gender menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah,

Berdasarkan Gambar 1.1 bisa diperhatikan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Pulau Jawa mengalami perubahan tiap-tiap tahunnya. Namun jika dilihat dari Jawa Barat, angka tertinggi adalah 90,23 yang terjadi pada tahun 2023, dan terendah adalah 89,19 yang terjadi pada tahun 2018. Tabel tersebut menjelaskan mengapa Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat keenam dari enam provinsi di Pulau Jawa. kondisi ini memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki Indeks Pembangunan Gender yang masih terbelah di bawah rata-rata dari pada provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.

Jawa Barat memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda yang bisa mempengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan gender. Satu-satunya Provinsi di Pulau Jawa dengan capaian Indeks Pembangunan Gender di bawah nasional adalah Jawa Barat. Hal itu disebabkan oleh populasi yang

cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat, proyeksi penduduk tahun 2023 memperlihatkan bahwa kira-kira 49,8 juta orang Indonesia tinggal di sana, menjadikan 17,88 persen dari total penduduk Indonesia.

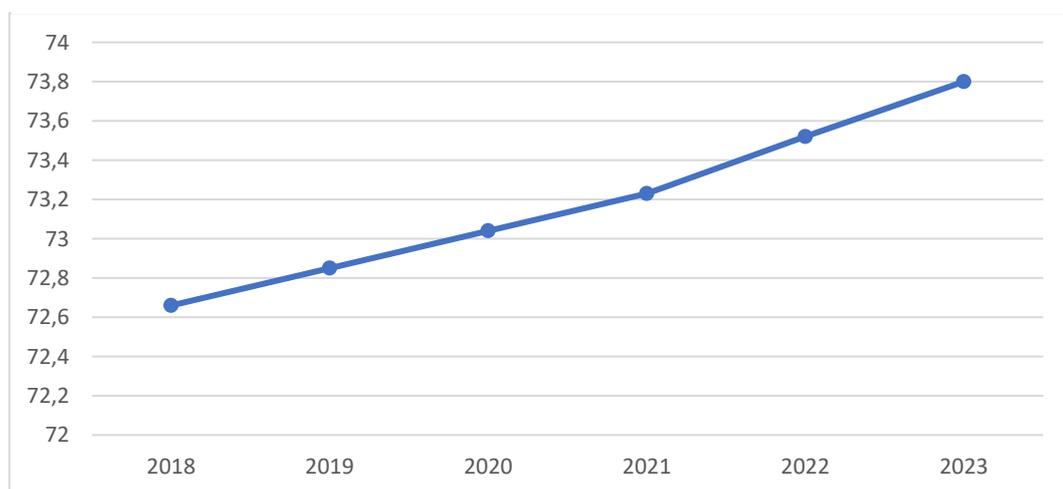
Di Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk laki-laki sering kali lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, harapan hidup wanita lebih tinggi, karena mereka lebih tahan terhadap penyakit dan memiliki risiko kematian yang lebih rendah saat tua. Kedua, wanita memiliki peran yang lebih stabil dalam keluarga dan masyarakat, yang berdampak pada angka kelahiran anak perempuan. Ketiga, banyak pria yang merantau untuk kerja, meninggalkan wanita di daerah asal, menyebabkan ketidakseimbangan gender. Faktor kematian pria akibat kecelakaan juga berkontribusi pada lebih banyaknya jumlah wanita.

Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah penerima migrasi seumur hidup tertinggi, berkaitan dengan hal itu banyak orang tinggal di daerah industri sebab mempunyai beberapa kawasan industri yang menjadi alasan mengapa banyak migran memilih Jawa Barat sebagai tempat untuk mencari pekerjaan. Dengan padatnya penduduk di Provinsi Jawa Barat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, berdasarkan yang dijelaskan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Pada Perempuan (KOMNAS), Jawa Barat merupakan Provinsi yang mempunyai banyak kasus femisida atau kejahatan sebab kebencian jenis kelamin terbanyak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memaparkan kesenjangan gender bisa diidentifikasi dengan memanfaatkan Indeks Pembangunan Gender. Kesenjangan dalam pembangunan manusia antara laki-laki

dan perempuan bisa diukur dengan memanfaatkan Indeks Pembangunan Gender. Menurut Indeks Pembangunan Gender, ketika populasi mendekati angka 100, kesenjangan gender dalam pembangunan manusia akan tertutup atau semakin rendah kesenjangan (kemenpppa.go.id, 2023). Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender, identik dengan dimensi IPM, yang memuat Rasio Lama Sekolah (RLS), Angka harapan Hidup (AHH), dan Angka Melek Huruf (AMH). Indeks Pembangunan Gender, bagaimanapun, memuat sudut pandang laki-laki dan perempuan. Kenaikan komponen itu tidak diragukan lagi berdampak pada perubahan data Indeks Pembangunan Gender dari tahun 2018 hingga 2023. Kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan mendasar perempuan harus ditingkatkan selama jangka waktu jika terkait dengan faktor-faktor yang tercantum sebelumnya.

Gambar 1. 2 Angka Harapan Hidup di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah,

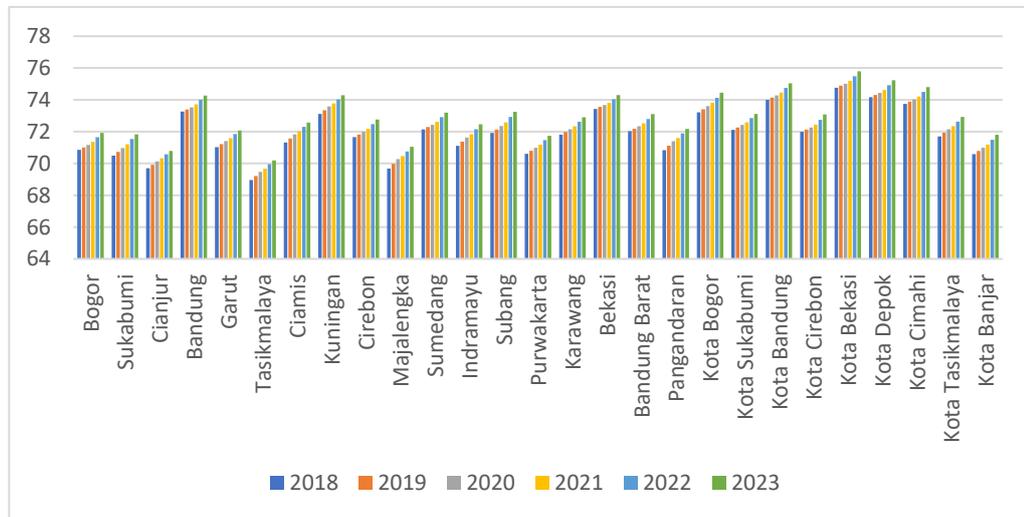
Pertumbuhan AHH di Jawa Barat terus meningkat tiap-tiap tahunnya, memperlihatkan bahwa populasi yang tinggi di Provinsi Jawa Barat harus dibarengi dengan Kesehatan penduduknya. Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa nilai AHH Provinsi Jawa Barat meningkat, dengan perkembangan rata-rata 73,8 pada tahun

2018-2023. Perkembangan relatif stabil ini memperlihatkan bahwa Upaya yang lebih besar diperlukan untuk meningkatkan AHH Provinsi Jawa Barat.

Banyak faktor seperti gizi masyarakat yang lebih baik, akses yang lebih banyak ke perawatan kesehatan, dan kualitas sanitasi yang lebih baik mungkin bertanggung jawab atas kenaikan harapan hidup di Jawa Barat. (World Health Organization, 2020). Meskipun demikian, perlu diingat bahwa kenaikan angka harapan hidup tidak merata di seluruh wilayah Jawa Barat, dan disparitas akses pada layanan kesehatan masih mungkin terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan (bps.co.id, 2023). Ada korelasi yang cukup besar antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kenaikan usia harapan hidup di Jawa Barat. Kenaikan usia harapan hidup merupakan hasil langsung dari kenaikan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, yang semuanya meningkatkan produktivitas pekerja.

Dengan harapan hidup yang lebih tinggi, masyarakat memiliki waktu yang lebih panjang untuk berkontribusi dalam aktivitas ekonomi, terlebih di sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, yang menjadi pendorong utama PDRB Jawa Barat. Tetapi, tantangan juga muncul sebab populasi yang lebih panjang usia membutuhkan kenaikan alokasi anggaran untuk layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur pendukung lainnya. Berkaitan dengan hal itu, pertumbuhan angka harapan hidup memberikan dampak positif pada PDRB, tetapi perlu diimbangi dengan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

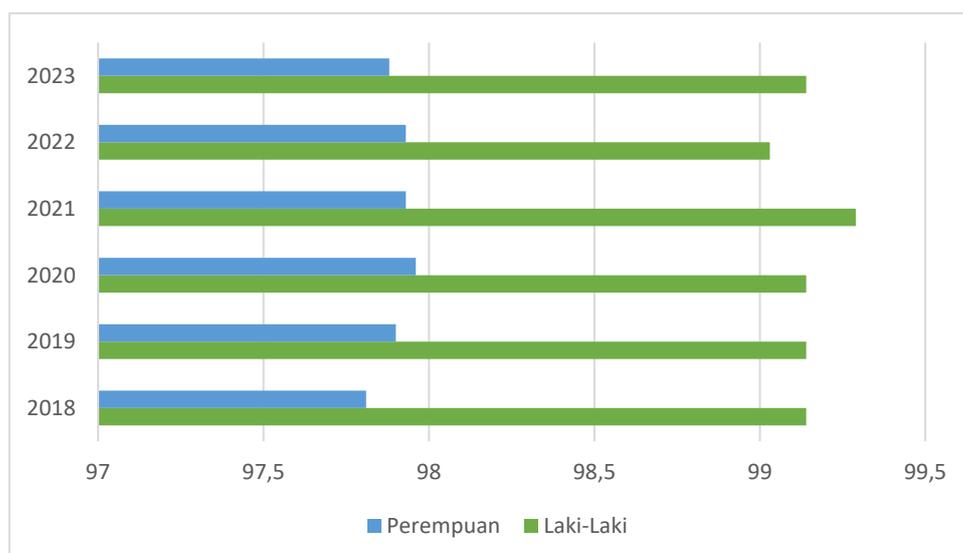
Gambar 1.3 Angka Harapan Hidup di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah, 2024

Bedasarkan Gambarl 1.3, di Provinsi Jawa Barat, bisa dipastikan bahwa kualitas Angka Harapan Hidup (AHH) tidak meningkat secara signifikan tiap-tiap tahunnya. Kabupaten Tasikmalaya mempunyai angka harapan hidup terendah di Jawa Barat (70,19), di lain sisi Kota Depok mempunyai angka harapan hidup tertinggi (75,79).

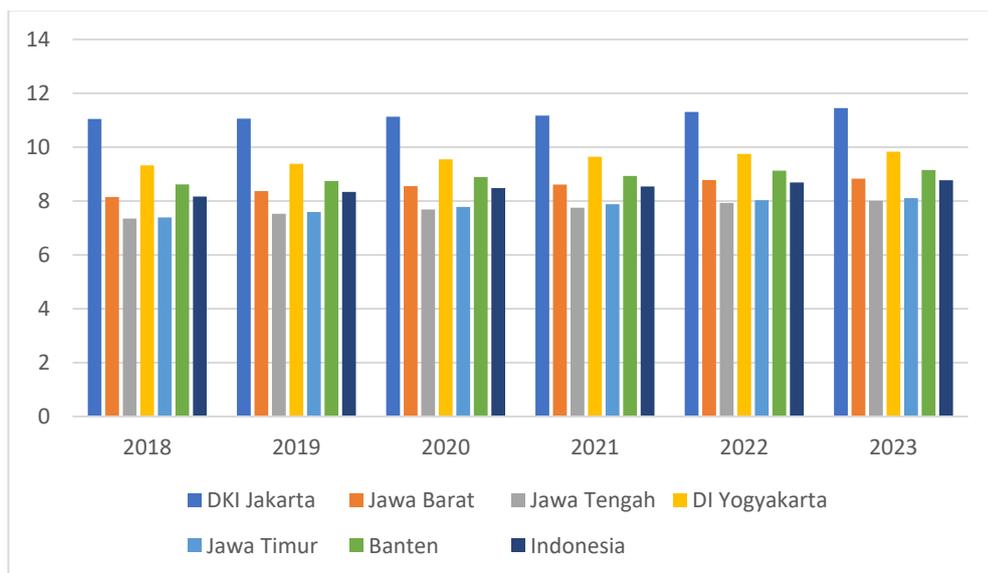
Gambar 1.4 Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah, 2024

Bedasarkan gambar 1.4, merupakan tabel Angka Melek huruf (AMH) yang memperlihatkan presentase pendidikan laki-laki dan perempuan yang berumur 15 tahun ke atas bisa membaca dan menulis. Gambar AMH memperlihatkan perbedaan angka yang relatif kecil antara gender. Akibatnya, masih ada individu yang belum menerima pendidikan yang layak. Perkembangan AMH di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2023 memperlihatkan kenaikan, tetapi tidak signifikan. Dalam aspek indikator AMH, rata-rata laki-laki masih mengungguli dengan angka 99,15 , di lain sisi rata-rata perempuan adalah 97,90.

Gambar 1. 5 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2023

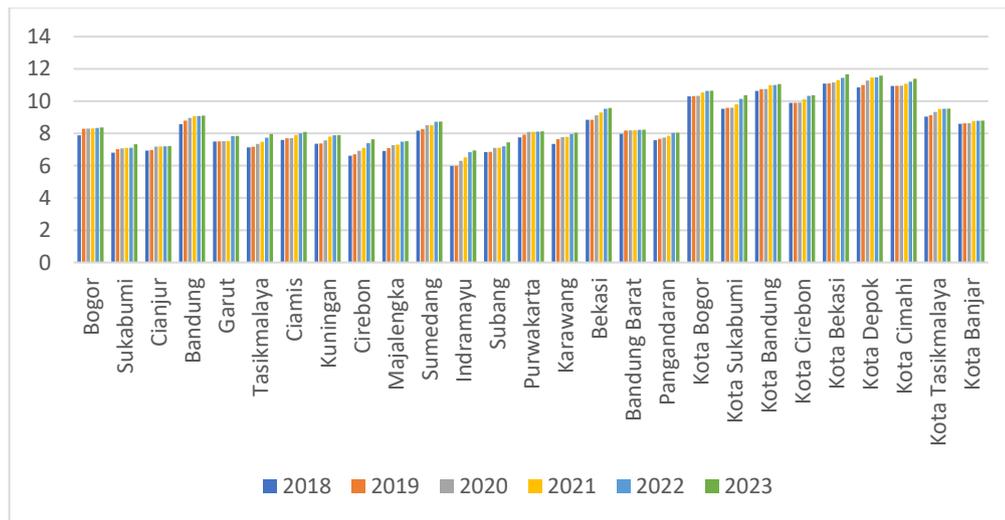


Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah, 2024

Gambar 1.5 memperlihatkan saat tahun 2018-2023 DKI Jakarta memiliki RLS tertinggi dengan rata-rata sejumlah 11,20 tahun, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki RLS dengan rata-rata sejumlah 9,58 tahun, Banten memiliki RLS dengan rata-rata sejumlah 8,91 tahun, Jawa Barat memiliki RLS dengan rata-rata sejumlah 8,55 tahun, Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki RLS dengan rata-rata sejumlah 7,80 dan 7,71 tahun. Ini memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan Provinsi lain

di Pulau Jawa Pendidikan di Jawa Barat sedang kurang dan perlu ditingkatkan. Gambar berikut memperlihatkan RLS di semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

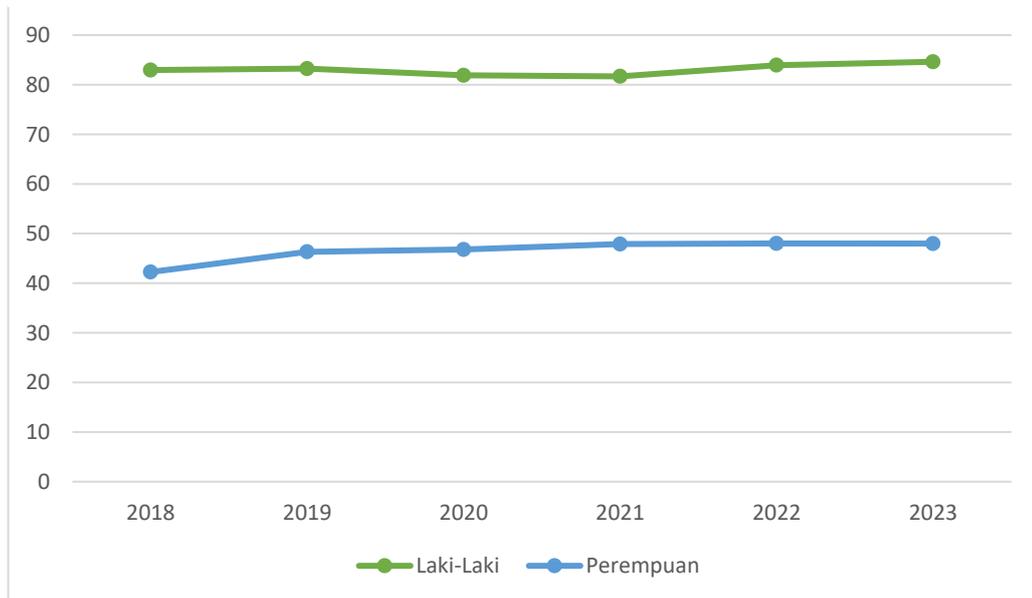
Gambar 1. 6 Rasio Lama Sekolah di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah, 2024

Bedasarkan gambar 1.6 mengalami kenaikan rata-rata lama sekolah (RLS) yang cukup besar. Sehingga bisa dijelaskan bahwa kualitas sekolah rata-rata meningkat tiap-tiap tahunnya. Rata-rata tahun sekolah (RLS) menggambarkan lamanya waktu yang biasanya dibutuhkan individu berumur 15 tahun ke atas untuk menyelesaikan semua pendidikan formal. Menurut RLS, Kabupaten Indramayu memiliki rata-rata tahun pendidikan terendah (6,94), sedangkan Kota Bekasi memiliki rata-rata tahun pendidikan tertinggi (11,66) di Provinsi Jawa Barat. Fenomena ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa pendidikan di Provinsi Jawa Barat sangat berbeda.

Gambar 1. 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah, 2024

Berdasarkan gambar 1.7, Di Provinsi Jawa Barat, angkatan kerja perempuan memiliki tingkat partisipasi sekitar 40%, yang secara signifikan terklasifikasi lebih rendah. Mengingat pendapatan dan pendidikan berdampak pada partisipasi angkatan kerja, hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan di Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar laki-laki usia kerja terlibat dalam pengejaran ekonomi, yang juga mendapat dampak dari budaya Indonesia, yang biasanya memandang laki-laki sebagai pencari nafkah.

Berdasarkan analisis latar belakang itu, bahwa penulis tertarik untuk menjalankan penelitian dengan judul **“Ketimpangan Gender Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah sejumlah masalah yang dirumuskan untuk studi ini berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas:

1. Apakah ketimpangan gender dari indeks angka harapan hidup berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah ketimpangan gender dari indeks rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah ketimpangan gender dari indeks tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sepadan dengan latar belakang dan rumusan masalah, oleh karena itu didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh ketimpangan gender dari indeks angka harapan hidup terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Menganalisis pengaruh ketimpangan gender dari indeks rata-rata lama sekolah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Menganalisis pengaruh ketimpangan gender dari indeks tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

1.4 Ruang Lingkup

Pendekatan penelitian kuantitatif yang dipakai penulis merupakan metode analisis regresi data panel. Data sekunder dari Badan Pusat Statistik dihimpun dalam studi ini. Ada tidaknya ketimpangan gender yang berlangsung di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat bisa diketahui dengan melakukan pembatasan pada studi ini. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Rata-rata Lama Pendidikan (RLS), dan Angka Harapan Hidup (AHH) dijadikan sebagai variabel bebas dalam studi ini, di lain sisi Produk Domestik Regional Bruto dijadikan sebagai variabel terikat. Variabel-variabel tersebut dipakai sebagai alat ukur untuk mengetahui besaran Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat lewat penerapan pendekatan analisis regresi data panel.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Para pembuat kebijakan bisa mempertimbangkan hal ini saat memutuskan kebijakan yang tepat, khususnya yang menangani kesenjangan gender, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Mengenai ada tidaknya akibat yang diterima produk Domestik Regional Bruto dari ketimpangan gender, ini mungkin berfungsi sebagai panduan atau referensi untuk studi yang akan datang.
3. Dapat dimasukkan dalam literatur ilmiah tentang ketimpangan gender. Hubungan antara pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto.